PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF TRI HITA KARANA

Oleh:

Bayu Anggara¹ dan Komang Ayu Suseni²
(*anggarabayu796@gmail.com*) (*ayu.suseni1617@gmail.com*)

Abstrak: Bali, sebagai destinasi wisata terpopuler di dunia, menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang unik. Namun, pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat, dengan tercatatnya 3.528 unit akomodasi pada tahun 2022, membawa dampak positif dan negatif, termasuk pencemaran lingkungan akibat limbah dari hotel dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2024, dengan Kota Denpasar sebagai penyumbang terbesar. Sesuai ajaran Tri Hita Karana, yang menggarisbawahi hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam, pelestarian lingkungan hidup sekaligus pengembangan pariwisata sangatlah penting. Penelitian untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait tindakan ilegal perusakan lingkungan hidup di Indonesia dan implementasinya dari perspektif Tri Hita Karana. Tinjauan pustaka dan penelitian hukum normatif dilakukan, dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan terkait. Temuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menjaga ekosistem Bali dan menjamin keberlanjutan pariwisata yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: Bali, Hukum Pidana, Tri Hita Karana.

PENDAHULUAN

Bali adalah pulau Indonesia yang terkenal sebagai tujuan wisata global utama. Bali menawarkan perpaduan unik antara warisan budaya yang kaya, pemandangan alam yang menakjubkan seperti sawah terasering, pantai berpasir putih, air terjun, dan gunung berapi aktif. Agama yang dominan di antara penduduk Bali adalah Hindu. Hampir setiap lokasi di pulau ini memiliki pura, baik bangunan besar untuk ritual publik maupun bangunan kecil yang terletak di dalam rumah pribadi. Selain disebut Pulau Dewata, Bali juga dikenal Pulau Seribu Pura. Upacara keagamaan yang sakral berdampak signifikan pada hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Bali. Hal ini memperindah lanskap Bali yang menakjubkan serta budayanya yang khas, unik, dan terpelihara dengan baik. (Picard, 2006).

¹ Dosen Hukum Pidana Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

² Dosen Hukum Hindu Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

Kekayaan dan keunikan budaya serta alamnya yang memukau, menjadikan Bali sebagai destinasi wisata utama dunia yang sangat menarik bagi wisatawan lokal atau internasional. Untuk menopang pariwisata Bali, diperlukan akomodasi sebagai fasilitas pendukung utama seperti hotel, villa, apartemen, dll. Pada tahun 2022, tercatat ada 3.528 unit usaha akomodasi di Bali, dengan 434 unit atau sekitar 12,3% di antaranya merupakan usaha baru yang menunjukkan pertumbuhan sektor ini. (Sucipta, 2024) Hal ini tentu akan memberikan dampak positif termasuk peningkatan ekonomi melalui pariwisata, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur yang lebih baik. Namun, hal ini juga bisa mengakibatkan dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik, termasuk polusi dan degradasi lingkungan. Hal ini dapat terjadi akibat pembuangan sampah yang tidak memadai, dan hal ini telah terjadi di Bali. Sebagaimana dilaporkan (detikNews, 2011), tiga belas pantai di Bali, termasuk Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Benoa, dan Pantai Padangbai, telah ditetapkan sebagai pantai yang tercemar akibat sampah. Polutan yang mencemari pantai antara lain deterjen, nitrat, timbal, dan minyak. Hotel-hotel berkontribusi terhadap polusi dengan membuang sampah mereka ke pantai.

Lebih lanjut, bukti yang ada saat ini dengan tegas menunjukkan ekspansi dan kemajuan penginapan wisata "tak terkendali." Kondisi ini mengakibatkan tren peningkatan alih fungsi lahan untuk perumahan. Data BPS menunjukkan pertumbuhan tahunan yang berkelanjutan dalam jumlah hotel berbintang di Bali. Pada tahun 2000, terdapat 113 hotel berbintang; pada tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 339, sehingga totalnya menjadi 541 hotel berbintang. Pada tahun 2000, terdapat 19.529 kamar hotel, yang meningkat menjadi 54.184 pada tahun 2023. Alih fungsi lahan di Bali telah menyebabkan pelanggaran keberlanjutan lingkungan, bahkan berkedok pembangunan pariwisata. Misalnya, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang kurang lebih 96 kilometer. Walhi Bali menemukan pembangunan jalan mengganggu 480,54 hektar lahan persawahan yang subur (Krisnayanti, 2024).

Permasalahannya lebih dari itu; kondisi sampah di Provinsi Bali saat ini semakin memprihatinkan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan produksi sampah di Bali diproyeksikan akan melebihi 1,2

juta ton pada tahun 2024. Kota Denpasar merupakan penyumbang utama, dengan kontribusi sekitar 360.000 ton. Sampah organik berupa sisa makanan dan dahan pohon menyumbang 68,32 persen. Meningkatnya jumlah sampah ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah, ditambah dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Bali (Pristiandaru, 2025).

Jika hal ini dibiarkan maka akan mengancam keharmonisan dan keajegan alam Bali yang menganut ajaran Tri Hita Karana yakni menekankan tiga hubungan yang harmonis yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), hubungan manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam (*Palemahan*). Prinsip ini sangat penting dalam budaya Bali dan menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat. Saat ini, penduduk Bali memiliki kesulitan yang signifikan dalam menyelaraskan pertumbuhan pariwisata dengan perlindungan lingkungan. Dengan banyaknya masalah lingkungan saat ini diperlukan aturan untuk melindungi ekosistem dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak keindahan alam serta budaya. Pemerintah harus tegas dalam menangani permasalahan lingkungan ini dengan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar dan merusak alam Bali.

Hukum Pidana bisa di gunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk menangani pelanggaran yang merusak lingkungan di Bali. Penerapan hukum pidana dapat menjadi alat yang efektif untuk memberikan efek jera pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian jurnal dengan judul "Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Tri Hita Karana : Studi Kasus Penegakan Hukum Di Bali". Dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana terhadap perusakan lingkungan, serta pengaturan hukum lingkungan dalam perspektif Tri Hita Karana. Hasil penelitian diharap sebagai acuan menentukan kebijakan dalam upaya pencegahan kerusakan alam lingkungan demi menjaga keharmonisan dan keajegan alam Bali.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka, yang umumnya disebut studi pustaka, yang melibatkan penelitian yang didasarkan pada penelaahan beragam materi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Jurnal ini juga menggunakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan norma atau aturan hukum sebagai landasan penelitian. Tulisan ini memiliki metodologi legislatif dan konseptual. Metode legislatif digunakan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan terkait hukum lingkungan (Anggara, 2021). Penulisan dilakukan setelah pengumpulan informasi tertentu, dengan memastikan bahwa item yang disertakan bersifat bibliografi, bergantung pada teknik penelitian yang digunakan. Penelitian jurnal ini bersifat deskriptif, menekankan penjelasan sistematis berdasarkan informasi faktual yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti memiliki pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang objek dan sumber yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, yang dapat diperoleh dari artikel jurnal sebelumnya, temuan dari studi tesis dengan tema yang serupa, dan sumber terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Terhadap Pengerusakan Lingkungan

Perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana mencakup perbuatan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Saat ini, isu lingkungan menjadi topik utama wacana global, terutama di Bali. Pencemaran dan degradasi yang disebabkan oleh manusia telah menciptakan kondisi lingkungan yang membahayakan masa depan kehidupan manusia. Di Indonesia, pencemaran dan degradasi lingkungan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Bagi orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan tersebut. Ketentuan tersebut terutama tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undangan turunannya (Rachmat, 2022).

Pengaturan terhadap tindak pidana terhadap pengerusakan lingkungan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain dalam Pasal 98 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, yang mengakibatkan

pelanggaran terhadap syarat baku mutu udara ambien, air, laut, atau faktor perusak lingkungan hidup lainnya. Pada ayat (1) Pasal 98, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Ketentuan ini menegaskan kesengajaan dalam pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana berat yang mendapat hukuman signifikan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup. Ayat (2) Pasal 98, memperberat sanksi apabila pencemaran tersebut mengakibatkan luka atau bahaya kesehatan pada manusia, dengan ancaman pidana penjara 4 - 12 tahun dan denda minimal Rp 12 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak langsung terhadap kesehatan manusia menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman, menegaskan perlindungan hukum terhadap keselamatan masyarakat dari risiko pencemaran.

Selanjutnya, ayat (3) Pasal 98, memberikan sanksi paling berat jika perbuatan pencemaran menyebabkan luka berat atau kematian, dengan pidana penjara 5 - 15 tahun dan denda minimal Rp 15 miliar. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menyesuaikan tingkat keseriusan akibat pencemaran, sekaligus memberikan efek jera maksimal bagi pelaku yang menyebabkan kerugian fatal terhadap manusia dan lingkungan. Secara keseluruhan, Pasal 98 menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pencemaran lingkungan dengan memperhitungkan unsur kesengajaan dan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kualitas lingkungan maupun kesehatan manusia. Besaran hukuman penjara dan denda yang tinggi bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan tanggung jawab pelaku agar tidak merusak lingkungan hidup secara sengaja.

Pasal 99 mengatur sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan yang terjadi karena kelalaian, berbeda dengan Pasal 98 yang mengatur kesengajaan. Ayat (1) menyatakan: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan mutu udara ambien, air, air laut, atau lingkungan hidup melampaui baku mutu yang telah ditetapkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar. Ketentuan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam pencemaran lingkungan tetap merupakan tindak pidana serius, namun dengan ancaman hukuman yang lebih

ringan dibandingkan kesengajaan, sebagai bentuk proporsionalitas hukum. Ayat (2) memberikan sanksi yang lebih berat bagi kasus-kasus yang kelalaiannya membahayakan kesehatan manusia atau cedera, termasuk denda minimal Rp2 miliar hingga Rp 6 miliar dan kemungkinan hukuman penjara 2 hingga 6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif terhadap kesehatan manusia menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman, menegaskan perlindungan hukum terhadap keselamatan masyarakat dari risiko pencemaran akibat kelalaian. Selanjutnya, ayat (3) memberikan sanksi paling berat jika kelalaian menyebabkan luka berat atau kematian, dengan pidana penjara 3 - 9 tahun dan denda minimal Rp 3 miliar. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan yang menyesuaikan tingkat keseriusan akibat kelalaian, sekaligus memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku yang menyebabkan kerugian fatal terhadap manusia dan lingkungan. Secara keseluruhan, Pasal 99 menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi karena kelalaian dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan. Hukuman penjara dan denda yang cukup tinggi bertujuan untuk mendorong kewaspadaan dan tanggung jawab pelaku agar tidak mengabaikan kewajiban menjaga kualitas lingkungan hidup.

Seseorang dapat dikenakan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun apabila terbukti bersalah menghasilkan sampah B3 tanpa pengelolaan yang baik, sebagaimana Pasal 59. Ayat pertama Pasal 59 menyatakan setiap badan usaha wajib mengelola sampah B3 yang dihasilkannya. Setiap badan usaha yang menghasilkan sampah B3 tanpa pengelolaan yang baik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal ini. Klausul ini menunjukkan komitmen legislatif yang kuat untuk mempromosikan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah B3, yang bertujuan untuk mencegah dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pasal 59, ayat 1, menggambarkan tanggung jawab setiap entitas yang menghasilkan sampah B3 untuk mengelola limbah dengan tepat dan sesuai persyaratan yang relevan. Pasal 103 berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelanggar kewajiban pengelolaan limbah B3 sebagaimana diuraikan dalam Pasal 59.

Sanksi pembuangan sampah dan bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama tiga tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104. Setiap orang dilarang membuang sampah atau bahan lain ke lingkungan hidup tanpa terlebih dahulu memperoleh izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Yang dimaksud dengan "pembuangan" adalah proses pembuangan sampah dan/atau bahan ke dalam media lingkungan hidup tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi.

Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama tiga tahun. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepemilikan izin lingkungan sebagai prasyarat legal dalam menjalankan usaha atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan, sehingga bertujuan mencegah kerusakan lingkungan sejak tahap perizinan.

Berdasarkan Pasal 112, pejabat publik diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah, apabila dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan badan usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerugian yang dapat menimbulkan jatuhnya korban manusia. Pasal ini ditujukan kepada pejabat berwenang yang sengaja lalai mengawasi ketaatan pengelola usaha/kegiatan terhadap standar dan perizinan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 71 dan Pasal 72. Kelalaian pengawasan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, mengakibatkan pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Pasal ini menegaskan tanggung jawab aparat pengawas lingkungan dalam mencegah dampak fatal dari pelanggaran lingkungan, sekaligus memberikan efek jera bagi pejabat yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Baku mutu udara ambien sendiri adalah standar kualitas udara di lingkungan yang tidak boleh dilampaui agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Dari Pengaturan tersebut dapat kita ketahui bahwa Sanksi pidana ini dirancang untuk memberikan efek jera dengan penjara dan denda yang meningkat sesuai tingkat kesengajaan dan dampak pencemaran, termasuk luka, bahaya kesehatan, atau kematian. Pengelolaan limbah B3, izin lingkungan, dan larangan dumping tanpa izin diatur ketat, serta pengawasan oleh pejabat berwenang juga menjadi tanggung jawab hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

2. Pengaturan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif *Tri Hita Karana* Di Bali

Pengaturan hukum lingkungan dalam perspektif *Tri Hita Karana* di Bali berfokus pada pencapaian keseimbangan dan keharmonisan antara tiga hubungan utama, yaitu manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). *Tri Hita Karana* yakni sikap hidup seimbang diantaranya hubungan harmonis dengan Tuhan (*Parahyangan*), hubungan harmonis dengan manusia (*Pawongan*) dan hubungan harmonis dengan alam (*Palemahan*). Dalam filosofi *palemahan*, dimana kita berpijak maka disana kita harus menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menumbuhkan rasa welas asih terhadap alam dan lingkungan memberikan pelajaran tentang keseimbangan dalam eksistensi manusia, yang relevan bagi pengelolaan masa kini dan masa depan. Pelajaran tentang keseimbangan dalam hidup mengarahkan individu untuk mencapai eksistensi yang aman, menyenangkan, dan bermanfaat (Mayoni, Widhiyaningsih, Dharnendri, Semaranatha, & Wiryasanjaya, 2023).

Konsep ini menjadi landasan filosofis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekologis secara holistik. Dalam aspek *Parhyangan*, pengaturan hukum melindungi tempat suci dan pelaksanaan upacara keagamaan yang menjaga kesucian lingkungan spiritual. Pada aspek *Pawongan*, hukum mengatur interaksi sosial dan tata kelola masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial yang mendukung kelestarian lingkungan, termasuk

pengelolaan sampah dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Sedangkan pada aspek Palemahan, pengaturan hukum menekankan pelestarian alam dan kebersihan lingkungan, seperti larangan membuang sampah sembarangan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari sesuai filosofi menjaga tempat berpijak. Implementasi pengaturan ini juga diukur melalui komitmen terhadap kualitas lingkungan, penerapan arsitektur tradisional yang ramah lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Prinsip ini mengarahkan pada pengaturan yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial budaya yang kuat. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan di Bali tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, juga mengintegrasikan kearifan lokal yang mengedepankan penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan dan warisan leluhur. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan adat dan praktik ritual yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian kawasan suci, serta pengelolaan limbah dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Salah satu aspek utama dalam menjaga lingkungan adalah *Bhuta Hita*, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam semesta yang dijelaskan dalam Reg. Veda III.51.5, yang menyatakan:

Indraa ya dyaava osadhir uta aapah Rayim raksanti jirayo vanani

Artinya: Lindungilah sumber sumber kekayaan alam seperti atmosfer tanaman tumbuh tumbuhan berhasiat obat sungai sungai sumber air, dan hutan belantara Mantram ini menyampaikan gagasan bahwa alam semesta berfungsi sebagai sumber kebahagiaan yang harus dijunjung tinggi dan dijaga melalui prinsip yadnya, atau tindakan altruistik, sebagaimana diamanatkan oleh perintah Tuhan.

Mantra ini menekankan pentingnya memenuhi *Rna* untuk melunasi utang, dengan demikian memastikan keharmonisan dengan alam, yang merupakan hakikat kehidupan, dan mencegah bencana alam akibat tindakan manusia. Memuja alam melalui ritual *Bhuta Yadnya* Hindu tidak termasuk penyembahan berhala; melainkan merupakan ungkapan cinta kasih murni sesuai dengan filosofi Hindu.

Pada zaman dahulu, sesuai ajaran Hindu, *Prajapati* menciptakan kosmos dan

mahluk- mahluknya melalui persembahan *Yajna*, sebuah ritual suci dalam agama Hindu. Persembahan *Yajna* mendorong koeksistensi damai antara manusia dan kosmos, mendorong hubungan timbal balik dengan lingkungan melalui praktik suci seperti penanaman pohon. Salah satu cara untuk mewujudkan konsep *Bhuta Hita* adalah melalui pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon. Pohon memberikan beberapa manfaat bagi ekologi, seperti menghasilkan oksigen, yang vital untuk pernapasan. Penanaman pohon tidak hanya bermanfaat bagi alam tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Melakukan ritual spiritual dapat memberikan pahala dan kebahagiaan bagi umat manusia dan kosmos secara kolektif. Prinsip *Tri Hita Karana*, khususnya *Bhuta Hita*, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Hal ini mendorong keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari inisiatif yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan abadi sekaligus mengurangi bencana alam. Bencana alam dipandang sebagai salah satu aspek tatanan alam semesta dalam kehidupan. Meskipun manusia mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan di balik bencana-bencana ini, bencana tersebut merupakan bagian integral rancangan Tuhan yang penuh teka-teki. Tidak berarti manusia terbebas dari kewajiban untuk menjaga dan memelihara kosmos.

Gagasan *karma* dalam agama Hindu memiliki makna penting. *Karma* menyatakan bahwa aktivitas manusia di dunia ini akan memengaruhi nasib mereka di masa depan. Dalam ranah bencana alam, inisiatif untuk menjaga lingkungan dan terlibat dalam praktik ekologi yang bertanggung jawab dapat berdampak positif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, meskipun bencana alam dipandang sebagai unsur rancangan ilahi, manusia harus waspada dalam menjaga dan memelihara kosmos, serta bertanggung jawab atas dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sudut pandang Hindu menggarisbawahi pentingnya kesadaran lingkungan dan perilaku etis sebagai sarana untuk mengurangi dampak bencana alam dan menjaga keseimbangan dengan kosmos.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengrusakan lingkungan di

Indonesia diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan, dengan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran yang mengakibatkan luka atau kematian. Selain itu, pengaturan hukum lingkungan di Bali juga dipengaruhi oleh filosofi Tri Hita Karana, menekankan keseimbangan manusia, Tuhan, dan alam. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis, serta mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, tindakan menjaga lingkungan, seperti menanam pohon, dianggap sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam dan merupakan kewajiban spiritual yang mendukung kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan di Bali tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum, tetapi juga pada kearifan lokal yang menghormati alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 122-123.
- Detiknews. (2011, Mei 11). *Pantai Bali Tercemar Limbah, Badan Lingkungan Hidup Sidak Hotel Di Kuta*. Retrieved From Detiknews: <https://News.Detik.Com/Berita/D-1637692/Pantai-Bali-Tercemar-Limbah-Badan-Lingkungan-Hidup-Sidak-Hotel-Di-Kuta>.
- Konsep Tri Hita Karana: Bhuta Hita Dalam Melestarikan Lingkungan*. (2024, Maret 15). Retrieved From Tarubali Puprkim Prov. Bali: <https://Tarubali.Baliprov.Go.Id/Konsep-Tri-Hita-Karana-Bhuta-Hita-Dalam-Melestarikan-Lingkungan>.
- Krisnayanti, N. M. (2024, Juni 13). *Walhi: Jumlah Hotel Di Bali Berlebihan Di Taraf Merusak Alam*. Retrieved From Detiktravel: <https://Travel.Detik.Com/Travel-News/D-7388872/Walhi-Jumlah-Hotel-Di-Bali-Berlebihan-Di-Taraf-Merusak-Alam>.
- Mayoni, K., Widhiyaningsih, H. I., Dharnendri, Y. L., Semaranatha, K. I., & Wiryanajaya.
- M. T. (2023). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 90-91.
- Picard, M. (2006). *Bali : Pariwisata Budaya Daan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Pristiandaru, D. L. (2025, Februari 12). *Sampah Di Bali Kian Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya*. Retrieved From Kompas.Com: <https://Lestari.Kompas.Com/Read/2025/02/12/090000086/Sampah-Di-Bali-Kian-Mengkhawatirkan-Ini-Penyebabnya>.
- Rachmat, N. (2022). Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 188-209.
- Sucipta, I. N. (2024, Mei 15). *Moratorium Pengembangan Fasilitas Kepariwisata Di Bali*. Retrieved From Bali Post Portal Berita :<https://Www.Balipost.Com/News/2024/05/15/400111/Moratorium-Pengembangan-Fasilitas-Kepariwisata...Html>